

Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i3.6217>

Kekerasan Verbal dalam Interaksi Digital: Analisis Wacana Konten Program MBG pada Akun Instagram @mastercobuzier

Rada Lailatul Chusna¹, Roziana Febrianita^{2*}

^{1,2*} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

article info

Article history:

Received 29 December 2025

Received in revised form

10 January 2026

Accepted 30 January 2026

Available online July 2026.

Keywords:

Digital Interaction; Discourse Analysis; Verbal Abuse; MBG; Instagram.

Kata Kunci:

Interaksi Digital; Analisis Wacana; Kekerasan Verbal; MBG; Instagram.

abstract

This study examines the practices of verbal and non-verbal violence found in Instagram reels content by @mastercobuzier in response to public criticism of the (MBG) Program. Using Rodney H. Jones's digital discourse analysis approach, this research explores how violence is produced and normalized through text, context, interactional actions, and power relations. The findings reveal forms of verbal violence such as the utterances "pala lu PA!", "gue tabok!", and "sekaya apa ente?", which function as symbolic intimidation. Non-verbal elements including heightened intonation, pointing gestures, and emojis amplify the aggression and shape audience reception. The content shifts policy criticism into moral judgment of individuals, constructing the student who voiced criticism as improper and illegitimate. Ideologically, this pattern demonstrates elitist populism, in which public figures employ moral authority to silence criticism. Audience responses reveal the reproduction of symbolic violence through sarcastic comments, emphasizing that these power dynamics are not merely local phenomena but reflect global patterns in how public figures and digital platforms shape aggressive communication norms across cultures.

abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik kekerasan verbal dan non-verbal dalam konten reels Instagram @mastercobuzier sebagai respons terhadap kritik publik atas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menggunakan pendekatan analisis wacana digital Rodney H. Jones, penelitian ini menelaah bagaimana kekerasan diproduksi dan dinormalisasi melalui teks, konteks, tindakan interaksi, serta relasi kuasa. Temuan menunjukkan bentuk kekerasan verbal seperti ujaran "pala lu PA!", "gue tabok!" dan "sekaya apa ente?" yang berfungsi sebagai intimidasi simbolik. Elemen non-verbal intonasi tinggi, gestur menunjuk, dan emoji memperkuat agresi dan memengaruhi penerimaan audiens. Konten tersebut menggeser kritik kebijakan menjadi penilaian moral individu, sehingga siswa yang mengkritik dikonstruksi sebagai tidak pantas. Secara ideologis, pola ini menunjukkan populisme elitis ketika figur publik menggunakan otoritas moral untuk membungkam kritik. Respons audiens memperlihatkan reproduksi kekerasan simbolik melalui komentar sarkastik, menegaskan dinamika kekuasaan bukan hanya fenomena lokal, tetapi mencerminkan pola global tentang bagaimana figur publik dan platform digital membentuk norma komunikasi agresif lintas budaya.

Corresponding Author. Email: roziana.ilkom@upnjatim.ac.id^{2}.

1. Pendahuluan

Media sosial kini berperan sebagai ruang publik digital yang mempengaruhi pembentukan opini, nilai moral, dan pandangan politik masyarakat. Ruang digital ini semakin memperluas akses terhadap informasi sekaligus memperkuat kontrol sosial terhadap kekuasaan (Fatimah, 2025). Berbagai platform media sosial saat ini hadir dengan fungsi yang beragam, mulai dari sekadar berbagi konten hingga memungkinkan komunikasi dua arah (Wibowo *et al.*, 2024). Dalam hal ini, Instagram tidak lagi hanya menjadi hiburan semata, melainkan juga tempat di mana berbagai kepentingan, ideologi, dan relasi kuasa berinteraksi secara terbuka. Sebagai platform sosial kedua terpopuler di Indonesia dengan 103 juta pengguna aktif (Kemp, 2025), Instagram memanfaatkan fitur Reels untuk menyebarkan konten audiovisual secara cepat dan luas. Hal ini memberi figur publik kesempatan untuk menjangkau audiens yang lebih besar, dengan dampak yang tak terbantahkan dalam membentuk opini masyarakat. Namun, sifat komunikasi yang cepat, emosional, dan berbasis visual ini juga membuat Reels rentan terhadap munculnya konflik wacana serta praktik kekerasan simbolik yang terselubung dalam bahasa yang agresif, ejekan, atau penghakiman moral.

Kekerasan dalam komunikasi digital tidak selalu tampak dalam bentuk fisik, melainkan melalui penggunaan bahasa dan simbol yang merendahkan, mengintimidasi, atau memperkuat ketimpangan dalam relasi kuasa (Yusri, 2025). Dalam bukunya *The Internet of Garbage* (Jeong, 2015), Jeong menyatakan bahwa kekerasan verbal dalam ruang digital digunakan sebagai alat diskursif untuk menekan, mendeligitimasi, atau menyingkirkan subjek tertentu dengan menggunakan ujaran yang melukai secara psikologis. Sementara itu, kekerasan non-verbal dipertajam melalui intonasi, ekspresi wajah, gestur, dan simbol visual yang menambah intensitas pesan agresif. Dalam dunia media sosial, baik kekerasan verbal maupun non-verbal sering kali dianggap biasa, terutama ketika diproduksi oleh figur publik yang memiliki legitimasi sosial, popularitas, dan otoritas yang kuat. Fenomena ini tercermin dalam sebuah video Reels yang diunggah oleh Deddy Corbuzier (@mastercobuzier) pada 17 Januari 2025, sebagai respons terhadap kritik seorang siswa SD mengenai

rasa makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Video tersebut telah ditonton lebih dari 8 juta kali dengan 436 ribu likes dan 37,2 ribu komentar, serta menampilkan ujaran “kurang enak, pala lu PEA”, yang kemudian memicu kontroversi. Pernyataan ini dianggap mengandung kekerasan verbal serta melanggar prinsip perlindungan anak, sebagaimana disorot oleh Komisioner KPAI yang menyebutkan bahwa komentar tersebut berpotensi melanggar Pasal 76C UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak (Sukardi, 2025). Kasus ini penting untuk dibahas karena kekerasan verbal di media sosial Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan 87,6% kasus bullying berbentuk kekerasan verbal (Naurah, 2023). Konten yang viral dari figur publik dengan 12,3 juta pengikut ini turut membentuk norma komunikasi di ruang digital, menjadikan bahasa bukan hanya sebagai ekspresi pribadi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan simbolik. Penelitian terkait kekerasan verbal di media sosial telah berkembang dari berbagai perspektif dalam beberapa tahun terakhir. Robbani *et al.* (2023) menganalisis penggunaan verbal abuse dalam konten permainan video di YouTube dan menemukan bahwa kata-kata kasar kerap digunakan sebagai strategi branding yang menghibur, meski berisiko menormalkan kekerasan verbal.

Sementara itu, Putra & Zuhri (2024) mengkaji kritik sosial dalam podcast melalui analisis wacana digital, menunjukkan bagaimana humor dan sindiran digunakan untuk menyampaikan pesan politik. Dwityas *et al.* (2024) meneliti aktivisme digital perempuan di Instagram, mengungkapkan bagaimana media sosial bisa menjadi ruang untuk melawan kekerasan berbasis gender. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terfokus pada perilaku individu atau strategi komunikasi, tanpa menelaah hubungan yang lebih dalam antara relasi kuasa figur publik dengan diskursus kebijakan publik. Selain itu, kajian mengenai kekerasan verbal dalam konteks kebijakan publik, khususnya yang melibatkan anak sebagai subjek kritik, masih jarang ditemukan. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) belum banyak dibahas sebagai arena wacana digital yang memproduksi praktik kekerasan verbal melalui interaksi antara figur publik dan audiens. Lebih lanjut, penggunaan narasi pengalaman pribadi oleh figur publik untuk membungkam kritik bisa dipahami

sebagai bentuk populisme elitis suatu praktik diskursif yang mengklaim otoritas moral atas nama "pengalaman hidup", sembari mendeligitimasi suara-suara lain yang dianggap tidak relevan (Mudde & Kaltwasser, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis wacana digital yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang terkait erat dengan teknologi, relasi kuasa, serta interaksi pengguna dalam ruang digital (Jones *et al.*, 2015). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kekerasan verbal diproduksi, dinegosiasikan, dan dinormalisasi dalam interaksi digital. Penelitian ini juga akan menggali bagaimana kekerasan verbal diwacanakan dalam konten Reels Instagram @mastercobuzier terkait Program MBG dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan relasi kuasa dan populisme elitis dalam komunikasi figur publik di ruang publik digital.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *analisis wacana digital* (*digital discourse analysis*) yang dikembangkan oleh Rodney H. Jones (Jones *et al.*, 2015). Menurut Creswell & Creswell (2017), penelitian kualitatif adalah proses untuk memahami makna di balik pengalaman manusia, terutama yang terkait dengan isu-isu sosial yang muncul dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis komunikasi digital secara menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada struktur teks, tetapi juga pada konteks sosial, interaksi, serta ideologi dan relasi kekuasaan yang memengaruhi proses produksi dan konsumsi pesan. Objek penelitian dalam studi ini adalah konten *Reels* Instagram yang diunggah oleh akun @mastercobuzier yang membahas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus pada video yang menampilkan ujaran kontroversial terkait pernyataan seorang siswa sekolah dasar (SD). Unit analisis mencakup ujaran verbal dalam video tersebut serta komentar-komentar audiens yang muncul sebagai respons terhadap konten tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini

melibatkan pengumpulan data berupa teks komentar, scene video, *caption*, pilihan diksi, dan suara (Safira Putri *et al.*, 2022). Data dikumpulkan dari konten audiovisual (*video Reels*) dan komentar publik yang ada di Instagram. Data berupa ujaran verbal, ekspresi bahasa, serta respons audiens disimpan dalam bentuk tangkapan layar, rekaman video, dan salinan teks komentar. Transkripsi dilakukan secara verbatim, mencakup setiap kalimat, jeda, penekanan suara, intonasi, ekspresi wajah, gestur tubuh, dan penggunaan emoji/GIF yang muncul baik dalam video maupun komentar. Setelah proses transkripsi selesai, data dibagi berdasarkan topik dan konteks komunikasi yang relevan. Pengkodean tematik dilakukan melalui tiga tahap: (1) *open coding*, yaitu mengidentifikasi kata, frasa, atau ekspresi yang mengandung kekerasan verbal atau non-verbal; (2) *axial coding*, yang mengelompokkan temuan ke dalam kategori seperti penghinaan, panggilan nama, ancaman, trolling, dogpiling, dan penilaian moral; dan (3) *selective coding*, yaitu merumuskan pola wacana yang berhubungan dengan relasi kekuasaan dan populisme elitis. Analisis strategi bahasa digunakan untuk melacak bagaimana kekerasan verbal diwujudkan melalui pilihan diksi, intonasi, dan gaya ujaran tertentu. Selanjutnya, respons audiens di kolom komentar dianalisis untuk melihat bagaimana kekerasan verbal direproduksi, dimaknai, dan diterima oleh publik. Penafsiran akhir mengaitkan hasil analisis dengan situasi sosial yang lebih luas, khususnya relasi kekuasaan antara figur publik dan audiens dalam ruang publik digital. Semua data yang digunakan berasal dari ruang publik, sehingga penelitian ini tidak melanggar prinsip etika penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Relasi kuasa figur publik dalam produksi wacana kekerasan digital

Figur publik memiliki kekuatan yang signifikan dalam memengaruhi wacana digital, di mana mereka tidak hanya menyampaikan opini pribadi, tetapi juga membentuk opini publik melalui otoritas simbolik yang dimilikinya. Dalam produksi wacana kekerasan digital, figur publik sering kali menggunakan bahasa agresif, baik verbal maupun non-verbal, yang dianggap sah oleh audiens karena posisi mereka

sebagai pemimpin moral atau tokoh yang dihormati. Ujaran yang seharusnya dianggap sebagai kekerasan verbal sering kali dipersepsikan sebagai bentuk ketegasan atau pendidikan. Praktik ini menciptakan dinamika kekuasaan di ruang digital, di mana kritik terhadap figur publik atau kebijakan dapat dengan mudah dibungkam atau didelegitimasi, memperkuat kontrol sosial dan mempersempit ruang diskursus yang bebas.



Gambar 1. Konten video reels @mastercobuzier

Dalam konten Reels Instagram @mastercobuzier, kekerasan verbal tidak hanya muncul sebagai ekspresi emosi, tetapi lebih sebagai alat untuk mengontrol, menegur, dan mendisiplinkan audiens, termasuk anak-anak. Posisi Deddy Corbuzier sebagai figur publik dengan otoritas simbolik yang kuat memungkinkan ujaran agresifnya diterima sebagai bentuk ketegasan moral, bukan sebagai tindakan kekerasan. Pernyataan seperti "gue tabok" berfungsi sebagai ancaman simbolik yang lebih mengarah pada peneguhan otoritas kontrol daripada kekerasan fisik literal (Bourdieu, 1991). Sebagai figur publik dengan jangkauan audiens yang luas, Deddy memanfaatkan posisi tersebut untuk membentuk opini publik, di mana kritik terhadap kebijakan sering diposisikan sebagai bentuk kepedulian sosial, meski sebenarnya

mengandung kekerasan verbal. Media sosial sering kali mengaburkan batas antara otoritas pribadi dan publik, sehingga agresi verbal dianggap sah jika dibingkai dalam narasi moral. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dalam ruang digital tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan, tetapi juga oleh posisi sosial pembicara (Samudra & Febrianita, 2024). Temuan ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang menyoroti bahwa kekerasan verbal dalam konten digital tidak hanya berkaitan dengan kata-kata kasar, tetapi juga dengan siapa yang mengucapkannya. Posisi sosial figur publik memperkuat legitimasi kekerasan ini, menjadikannya tampak wajar bagi audiens. Kekerasan verbal ini kemudian berfungsi sebagai mekanisme dominasi simbolik yang mengatur norma komunikasi di ruang digital, membentuk batas antara yang benar dan yang salah dalam diskursus publik. Kekuasaan dalam wacana digital bukanlah fenomena satu arah; audiens juga memiliki peran dalam menanggapi dan menafsirkan pesan-pesan ini, menciptakan polarisasi antara yang mendukung dan yang menentang.

Kekerasan sebagai Respons terhadap Kritik Publik

Kekerasan verbal dalam konten digital sering kali digunakan sebagai respons terhadap kritik yang diajukan publik. Dalam kasus video Reels @mastercobuzier, kekerasan verbal muncul melalui penghinaan, ancaman, dan provokasi sebagai cara untuk membungkam kritik terhadap kebijakan, dalam hal ini Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ujaran seperti "gue tabok!" atau "pala lu PA!" bukan sekadar ekspresi emosi, melainkan bentuk defensif yang menegaskan dominasi figur publik terhadap kritik yang dianggap tidak sah. Praktik ini menggambarkan bagaimana figur publik menggunakan kekerasan verbal untuk mengalihkan fokus kritik kebijakan menjadi masalah moral pribadi, membatasi ruang untuk perdebatan yang konstruktif.

Tabel 1. Kekerasan verbal dalam konten video reels @mastercobuzier

No	Transkrip Video	Kekerasan Verbal
1	Pala lu PA!	Insult and name calling
2	Gila!	Insult and name calling
3	Sekaya apa ente?	Trolling
4	Gue tabok!	Threats

Deddy Corbuzier merespons kritik terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui praktik kekerasan verbal, yang berfungsi sebagai strategi diskursif untuk membungkam kritik publik. Ujaran seperti "kurang enak pala lu PA!" dan penekanan vokal pada kata "Gila!" menonjolkan bentuk kekerasan verbal, yang bukan hanya menyampaikan emosi, tetapi juga menegaskan norma moral tertentu. Dalam hal ini, kritik terhadap kebijakan diposisikan sebagai perilaku tidak etis dan tidak layak disuarakan. Kekerasan verbal semacam ini, termasuk *insult*, *name-calling*, dan *trolling*, membentuk dikotomi moral antara mereka yang menerima kebijakan dengan bersyukur dan mereka yang mengkritiknya sebagai pihak yang salah. Melalui strategi ini, Deddy mengendalikan makna kritik

dengan mendefinisikan siapa yang berhak berbicara dalam ruang publik digital. Selain itu, praktik trolling dengan ujaran seperti "Sekaya apa ente?" dan ancaman verbal seperti "gue tabok" memperkuat kontrol sosial dan membentuk norma diam (*silencing norms*). Ancaman ini, meskipun tidak selalu bersifat fisik, digunakan untuk melegitimasi kekerasan sebagai bentuk pendidikan moral, mempertegas posisi figur publik sebagai otoritas dalam membentuk perilaku masyarakat. Dalam wacana digital, kekerasan verbal ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi pribadi, tetapi sebagai alat dominasi simbolik yang mendisiplinkan audiens sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh figur publik.

Tabel 2. Kekerasan non-verbal dalam konten video reels @mastercobuzier

No	Transkrip Video	Kekerasan Non-Verbal
1	Pala lu PA!	Penekanan volume
2	"enak gak enak enak gak enak dimakan sama dia"	Ekspresi wajah <i>smirk</i>
3	"nah ente komplain"	Gesture jari menunjuk dan melotot
4	"... tapi masuk sekolah pagi-pagi 🤪"	Emoji tertawa

Selain kekerasan verbal, kekerasan non-verbal juga muncul dalam konten video Deddy Corbuzier. Penekanan intonasi dan volume suara, seperti pada kata "kurang enak" yang diulang dengan nada tinggi, berfungsi untuk merendahkan dan mengejek kritik terhadap makanan. Pengaturan volume suara yang tinggi memperjelas pesan dan menekankan poin penting dalam komunikasi, sehingga menciptakan efek dramatisasi yang mempermalukan subjek yang dikritik (Apriliyanti, 2023; Uwen *et al.*, 2024). Ekspresi wajah Deddy, yang terlihat menyeringai atau tertawa saat mengatakan "enak gak enak enak gak enak dimakan sama dia", juga memperkuat kekerasan non-verbal. Ekspresi wajah seperti ini bertujuan untuk merendahkan harga diri target melalui penghinaan dan ejekan (Pascual-Ferrá, 2016). Begitu pula dengan gestur tubuh Deddy yang menunjuk kamera sambil berkata "nah ente komplain", yang menggunakan *pointing gestures* untuk menuduh dan mempermalukan target kritik secara sosial (Kelmaganbetova *et al.*, 2023). Penggunaan emoji, seperti emoji tertawa "🤪" dalam caption, juga memainkan peran ganda dalam kekerasan non-

verbal. Pertama, emoji ini membingkai pesan sebagai humor, mengurangi tanggung jawab moral komunikator atas kekerasan yang disampaikan. Kedua, emoji ini mengajak audiens untuk tertawa bersama, menciptakan solidaritas di antara mereka yang setuju dan mempermalukan target kritik, memperkuat pola "in-group" versus "out-group" (Erle *et al.*, 2022). Kekerasan verbal dan simbolik yang dipraktikkan dalam konten ini berpotensi menormalkan kekerasan dalam ruang publik digital, menjadikan kritik kebijakan sebagai masalah moralitas pribadi. Penelitian ini mengungkap bagaimana kekerasan verbal tidak hanya digunakan untuk membungkam individu, tetapi juga menggeser fokus kritik menjadi persoalan karakter, sesuatu yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Putra & Zuhri (2024) dalam kritik sosial melalui podcast.

Moral Judgment melalui Takarir Reels Instagram
Takarir atau caption yang menyertai video Reels @mastercobuzier berfungsi sebagai alat untuk membingkai respons publik terhadap kebijakan MBG melalui penilaian moral. Caption tersebut secara

implisit membagi audiens menjadi dua kelompok: mereka yang menerima dan bersyukur, serta mereka yang mengkritik sebagai tidak bermoral. Narasi ini menciptakan hierarki moral, di mana sikap bersyukur dipandang sebagai tindakan yang benar, sementara keluhan terhadap kebijakan dianggap sebagai pelanggaran norma sosial. Melalui pendekatan ini, kritik terhadap kebijakan dikonversi menjadi persoalan moralitas individu, mengalihkan fokus dari isu kebijakan ke penilaian karakter pribadi.



Gambar 2. Caption video reels @mastercobuzier

Takrir atau caption pada video Reels @mastercobuzier berperan penting dalam membingkai respons publik terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), menggunakan mekanisme penilaian moral. Caption ini tidak hanya melengkapi visual video, tetapi juga mengarahkan audiens untuk menilai perilaku sosial tertentu sebagai bermoral atau tidak. Sikap yang menerima dan bersyukur terhadap program ini diposisikan sebagai tindakan yang benar secara moral, sementara mereka yang mengkritik kualitas makanan dianggap melanggar norma sosial. Dalam perspektif teori perkembangan moral (Kohlberg, 1981), penilaian moral ini mencerminkan orientasi tingkat konvensional, di mana kepatuhan terhadap norma sosial dan harapan kolektif menjadi dasar utama. Dalam narasi ini, sikap bersyukur terhadap bantuan negara dianggap sebagai moral yang benar, sementara kritik terhadap kualitas program MBG dianggap menyimpang dari nilai sosial dominan. Selanjutnya, pendekatan intuisi (Haidt, 2001) menggambarkan bahwa penilaian moral lebih dipicu oleh intuisi dan emosi ketimbang oleh logika rasional. Narasi perbandingan antara "yang bahagia" dan "yang mengeluh" membangkitkan respons emosional audiens, memicu empati atau kecemasan secara spontan. Pernyataan "rejeki tidak merubah manusia, rejeki menunjukkan karakter manusia sebenarnya" menjadi justifikasi moral yang memperkuat penilaian tersebut. Walaupun tidak secara eksplisit mengandung ujaran agresif, caption ini membangun

hierarki moral di ruang digital. Penerima program yang menerima dengan bersyukur ditempatkan pada posisi moral lebih tinggi, sedangkan yang mengeluh dianggap kurang bermoral. Dalam analisis wacana digital (Jones *et al.*, 2015), ini menunjukkan bagaimana wacana membentuk identitas dan relasi kuasa, di mana figur publik menetapkan standar moral tertentu bagi audiens. Moral judgment dalam caption ini berfungsi sebagai kekerasan simbolik non-verbal. Kritik terhadap MBG direduksi menjadi persoalan karakter individu, bukan evaluasi kebijakan, yang membuat respons kritis dianggap tidak layak secara moral.

Narasi Populisme Elitis di Media Sosial Instagram

Populisme elitis dalam media sosial sering kali tidak hanya muncul melalui retorika politik formal, tetapi juga terwujud dalam komunikasi sehari-hari figur publik di platform seperti Instagram. Populisme ini membagi masyarakat menjadi dua kelompok, yaitu "rakyat" dan "elite", yang digunakan sebagai dasar klaim legitimasi moral (Mudde & Kaltwasser, 2017). Dalam video Reels Deddy Corbuzier mengenai program Makanan Bergizi Gratis (MBG), delegitimasi terhadap kritik dibangun melalui narasi ketidakrelatan, yang memosisikan pengalaman pribadi sebagai standar kebenaran moral. Pernyataan seperti "yang bilang nggak penting itu karena nggak relate" dan "mending diem" berfungsi untuk membatasi partisipasi diskursif. Kritik terhadap kebijakan dipersempit menjadi persoalan empati pribadi, bukan sebagai diskursus struktural yang sah. Dalam analisis wacana digital, strategi ini bisa dipahami melalui konsep *stances* dan *positioning*, yaitu cara aktor media sosial menempatkan diri dan pihak lain melalui bahasa serta konteks platform (Jones *et al.*, 2015). Hal ini menciptakan hierarki moral yang mencerminkan relasi kuasa simbolik, di mana pengalaman pribadi dijadikan sumber otoritas moral. Pernyataan "mending diem" memperjelas upaya dominasi diskursif, bukan hanya menilai kritik, tetapi juga mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam percakapan publik. Dalam hal ini, kekerasan verbal digunakan sebagai mekanisme pembungkaman simbolik yang membatasi ruang bagi kritik yang sah. Praktik ini menunjukkan karakteristik populisme elitis, di mana figur publik mengklaim kedekatan dengan pengalaman "rakyat susah" sekaligus menegaskan superioritas moral mereka. Penelitian tentang populisme digital menunjukkan

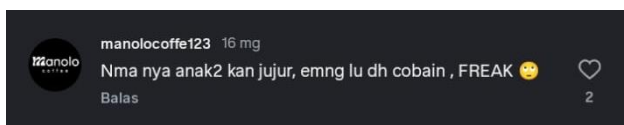
bahwa diskursus populis di media sosial sering kali membangun batas moral antara kelompok yang dianggap “berhak” dan “tidak berhak” bersuara, memperkuat delegitimasi kritik yang datang dari luar kelompok tersebut. Narasi ketidakrelatan (“nggak relate”) berfungsi sebagai strategi retorik untuk mengendalikan percakapan dan membentuk hierarki legitimasi dalam ruang digital. Penelitian ini mengisi celah yang belum banyak dibahas dalam kajian populisme dalam komunikasi selebritas. Deddy Corbuzier, sebagai figur publik, memainkan peran “elit moral” sambil mengklaim kedekatan dengan

rakyat, menciptakan paradoks yang memperkuat legitimasi kekerasan simbolik. Dalam praktik ini, pengalaman pribadi digunakan sebagai otoritas moral, sementara kritik terhadap kebijakan dipersempit menjadi ketidakmampuan memahami realitas. Kekuasaan simbolik figur publik berfungsi untuk mendisiplinkan audiens dan mengontrol legitimasi kritik terhadap kebijakan publik. Kekerasan verbal, dalam konteks ini, menjadi instrumen penting dalam praktik populisme elit di media sosial.

Tabel 3. Kekerasan verbal dan non-verbal pada interaksi kolom komentar

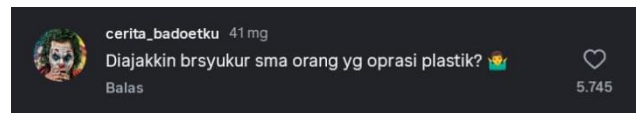
No	Komentar	Kekerasan Verbal	Non-Verbal
1	FREAK	Insult and name calling	Capslock, emoji eye-roll
2	Orang operasi plastik ngajarin bersyukur?	Insult and name calling	Tanda tanya retorik, emoji shrunk
3	GIF menjilat tangan pejabat	Trolling	GIF
4	Lebih berfaedah lu diem ded	Dogpiling	Likes massal
5	Jangan percaya review om deddy	Dogpiling	Emoji winking face

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa audiens secara aktif merespons wacana kekerasan yang ditampilkan dalam konten reels tersebut. Interaksi yang muncul menunjukkan adanya reaksi kolektif, di mana sebagian besar audiens mengekspresikan penolakan dan kritik terhadap konten Reels Deddy Corbuzier melalui bentuk kekerasan verbal dan kekerasan non-verbal.



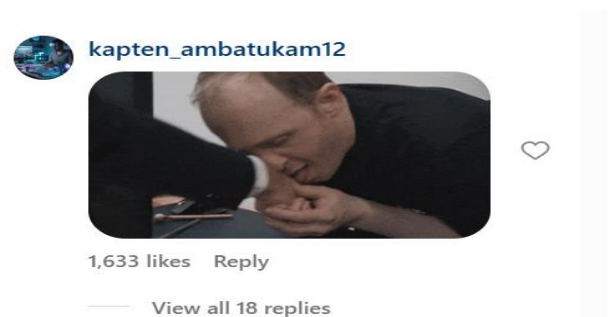
Gambar 3. Komentar akun @manolocoffe123

Hal ini nampak dari beberapa komentar audiens, yaitu komentar insult and name calling dari @manolocoffe123 seperti gambar 3. kata “FREAK” menunjukkan ekspresi penolakan yang merendahkan, menggambarkan seorang yang dianggap aneh, tidak wajar, atau menjijikkan. Penggunaan huruf kapital atau capslock berfungsi sebagai penekanan emosional yang kuat. Dengan Ekspresi tambahan melalui emoji *roll eyes* “🙄” (mata memutar) memperkuat sikap meremehkan dan jijik, seolah menganggap Deddy berlebihan dan tidak pantas menasihati publik.



Gambar 4. Komentar akun @cerita_badoetku

Gambar 4 Frasa “orang yg operasi plastik?” sebagai bentuk penghinaan yang menyiratkan ketidakotentikan atau kepalsuan dan digunakan untuk melegitimasi pesan moral Deddy dengan menyerang aspek fisiknya. Tanda tanya di sini berfungsi sebagai elemen non-verbal yang mengubah pernyataan menjadi sindiran. Selain itu, emotikon *shrug* 🙄 (lelaki mengangkat bahu) menandakan sikap dismissive yakni meremehkan, tidak peduli dan sinisme.



Gambar 5. Komentar akun @kapten_ambatukam12

Gambar 5 Bentuk kekerasan verbal lainnya dari komentar @kapten_ambatukam12 berupa GIF. Komentar GIF ini adalah bentuk *trolling* visual yang berfungsi untuk memprovokasi dan mempermalukan. Terlihat dari visual atau penggunaan gambar yang menunjukkan tindakan seseorang mencium dan menjilat tangan pejabat berfungsi sebagai simbol ejekan terhadap Deddy yang mendapatkan *likes* sebanyak 1.633 ribu dan 18 *replies*.



Gambar 6. Komentar akun @arshad_shakeel

Dengan 4.296 likes dan 9 tanggapan, komentar @arshad_shakeel "Lebih berfaedah lu diem ded.." menunjukkan praktik serangan kolektif atau *dogpiling* di ruang digital. Ujaran ini secara langsung mengandung perintah bernada menghina, menunjukkan bahwa Deddy harus diam karena pendapatnya dianggap tidak penting. Secara ironis, frasa "berfaedah" digunakan untuk mempermalukan tema diskusi, menunjukkan bahwa setiap ucapan Deddy dianggap tidak berguna. Gambar 6.



Gambar 1. Komentar akun @tantalia_ananda

Sementara itu pada gambar 7, komentar dari @tantalia_ananda menggunakan gaya *mock conclusion*, meniru struktur argumen rasional dengan cara yang mengejek. Sementara emotikon "😊" (wajah tersenyum) menunjukkan nada bercanda namun menyindir, frase "kesimpulannya..." memperlihatkan bahwa Deddy bukan sumber informasi yang dapat dipercaya. Ejekan kolektif terhadap Deddy, yang dianggap tidak pantas memberikan komentar tentang program sosial. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal dan non-verbal dalam konten dan kolom komentar Instagram beroperasi sebagai satu kesatuan praktik multimodal yang terorkestrasi.

Kekerasan tidak hanya berfungsi untuk mengekspresikan sikap personal, tetapi menjadi strategi diskursif untuk mempertahankan dominasi moral, membungkam kritik publik, serta membentuk norma komunikasi agresif yang dilegitimasi melalui humor dan partisipasi kolektif audiens. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam wacana digital tidak bersifat insidental, melainkan struktural dan sistemik dalam dinamika komunikasi figur publik di media sosial.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, praktik kekerasan verbal dan non-verbal dalam konten digital, khususnya yang diunggah oleh Deddy Corbuzier di Instagram @mastercobuzier, dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana digital. Kekerasan verbal yang muncul dalam bentuk ujaran seperti "pala lu PA!" dan "gue tabok!" berfungsi sebagai bentuk intimidasi simbolik, yang tidak hanya mengekspresikan agresi, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat dominasi moral melalui bahasa yang digunakan oleh figur publik. Seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Yusri (2025), kekerasan verbal dalam ruang digital sering kali tidak tampak sebagai kekerasan fisik, melainkan dalam bentuk ujaran yang merendahkan atau mengintimidasi yang merefleksikan relasi kuasa yang timpang. Dalam konteks ini, figur publik, dengan otoritas sosial dan simbolik yang dimilikinya, dapat mengarahkan audiens untuk menerima ujaran agresif sebagai bentuk ketegasan atau pengajaran moral. Fenomena ini sejalan dengan temuan Putra dan Zuhri (2024) yang mengamati bagaimana kritik sosial diubah menjadi penilaian moral melalui penggunaan bahasa agresif oleh figur publik, yang dapat membentuk opini audiens dengan cara yang tidak selalu rasional, melainkan lebih kepada dorongan emosional dan intuisi moral. Selain itu, kekerasan non-verbal yang dihasilkan melalui ekspresi wajah, gestur, dan intonasi, seperti yang ditemukan oleh Pascual-Ferrá (2016) dan Apriliyanti (2023), memperkuat pesan verbal dan memperjelas niat agresif yang terkandung dalam konten tersebut. Penggunaan emoji atau ekspresi wajah yang meremehkan juga berperan dalam membentuk respons audiens, seperti yang terlihat dalam penggunaan emoji tertawa untuk mengurangi tanggung jawab moral terhadap agresi verbal yang disampaikan. Hal ini mengonfirmasi pandangan Erle

et al. (2022) yang menekankan bahwa emoji berfungsi sebagai isyarat non-verbal yang dapat mengubah interpretasi pesan, menambah dimensi emosional, dan memperkuat pesan yang disampaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kritik terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dibahas dalam konteks kebijakan publik, tetapi dialihkan menjadi persoalan moralitas individu, sejalan dengan temuan dalam penelitian Samudra dan Febrianita (2024). Dalam hal ini, kritik terhadap kebijakan diposisikan sebagai ketidakbersyukuran dan tidak pantas disuarakan, sementara figur publik yang mengungkapkan kritik tersebut dianggap tidak memiliki moralitas yang tepat.

Fenomena ini mengarah pada praktik populisme elitis, di mana pengalaman pribadi atau posisi sosial digunakan untuk membungkam kritik dan menetapkan standar moral yang diterima secara luas oleh audiens. Temuan ini memperkuat pandangan Mudde dan Kaltwasser (2017) mengenai populisme sebagai ideologi yang membagi masyarakat dalam dua kategori, yaitu "rakyat" dan "elite", di mana kritik terhadap kebijakan dipandang sebagai ancaman terhadap otoritas moral figur publik. Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan verbal dan non-verbal yang terjadi dalam interaksi digital, baik yang diproduksi oleh figur publik maupun audiens, berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi moral, membatasi ruang untuk kritik, dan memperkuat norma komunikasi yang bersifat agresif di ruang digital. Seperti yang disarankan oleh Jones *et al.* (2015), analisis wacana digital membuka pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana kekerasan ini diproduksi, dinormalisasi, dan direproduksi dalam interaksi digital sehari-hari.

4. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini ditemukan, bahwa kekerasan verbal digunakan sebagai strategi diskursif yang dilegitimasi oleh relasi kuasa dan otoritas moral figur publik di ruang digital. Kekerasan verbal dalam video muncul dalam bentuk *insult and name calling*, trolling, serta ancaman simbolik yang dibingkai sebagai edukasi moral. Praktik ini diperkuat oleh kekerasan non-verbal berupa intonasi dan volume suara tinggi,

ekspresi wajah meremehkan, gestur tubuh dominatif, serta penggunaan emoji humor yang menyamarkan agresi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kritik terhadap MBG tidak dibahas sebagai persoalan kebijakan, melainkan dialihkan ke ranah moralitas individu melalui *moral judgment*. Respons audiens diklasifikasikan secara implisit sebagai "bersyukur" atau "tidak bersyukur", yang mencerminkan *moral judgment* berbasis norma sosial dan intuisi emosional. Pola ini berkelindan dengan strategi populisme elitis, di mana figur publik membangun otoritas moral atas nama kepentingan rakyat, sekaligus membatasi legitimasi kritik. Di tingkat interaksi, kekerasan verbal dan non-verbal direproduksi oleh audiens melalui komentar *insult*, trolling visual dengan emoji dan GIF, *dogpiling*, penggunaan huruf kapital, serta pertanyaan retorik. Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan dalam wacana digital bersifat relasional, multimodal, dan terdistribusi antara figur publik dan audiens dalam proses negosiasi makna dan kekuasaan.

5. Daftar Pustaka

- Apriliyanti. (2023). Analisis penggunaan komunikasi nonverbal pada presentasi kelas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7).
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Dwityas, N. A., Marta, R. F., & Briandana, R. (2024). Media sosial dan aktivisme digital perempuan #ibutunggalmelawan di Instagram. *Jurnal Komunikasi*, 18(2). <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.is2.art1>.
- Erle, T. M., Schmid, K., Goslar, S. H., & Martin, J. D. (2022). Emojis as social information in digital communication. *Emotion*, 22(7), 1529–1543. <https://doi.org/10.1037/emo0000992>.
- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam

- demokrasi era media baru. *Cakrawala*, 19(1), 67–86.
<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>.
- Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review*, 108(4), 814–834.
<https://doi.org/10.1037/0033-295X>.
- Jeong, S. (2015). *The internet of garbage* -- Sarah Jeong. WeLib.org.
- Jones, R., Gee, P., Barton, D., Snyder, I., Benson, P., Carrington, V., Merchant, G., Vásquez, C., & Selwyn, N. (2015). *Discourse and digital practices*.
- Kelmaganbetova, A., Mazhitayeva, S., Ayazbayeva, B., Khamzina, G., Ramazanova, Z., Rahymberlina, S., & Kadyrov, Z. (2023). The role of gestures in communication. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(10), 2506–2513.
<https://doi.org/10.17507/tpls.1310.09>.
- Kemp, S. (2025, February 25). Digital 2025: Indonesia. *Datareportal.com*.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development Volume 1: The philosophy of moral development* (1st ed., Vol. 1). Harper & Row.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*.
- Naurah, N. (2023, May 10). Kekerasan verbal jadi jenis bullying yang paling banyak dialami masyarakat. *GoodStats*. Retrieved from
- Pascual-Ferrá, P. (2016). Communicating aggression. *Communication Research Trends*, 35.
- Putra, G. E., & Zuhri, S. (2024). Analisis wacana digital kritik sosial dalam podcast Close The Door Feat Pandji Pragiwaksono. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11).
- Robbani, M. U., Arviani, H., Febriyanti, S. N., Studi, P., Komunikasi, I., Veteran, U., & Abstract, T. (2023). Analisis wacana digital penggunaan verbal abuse dalam konten gameplay Stumble Guys Luthfi Halimawan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 323–337.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8088409>.
- Safira Putri, D., Abidin Achmad, Z., Syarifah Alamiyah, S., Arviani, H., & Febrianita, R. (2022). Kritik satire pada pejabat negara Indonesia melalui roasting stand-up comedy Kiky Saputri di YouTube. *Jurnal Nomosleca*, 8(2).
- Samudra, G. B. E., & Febrianita, R. (2024). Analisis rekonstruksi makna dan kekuasaan dalam pidato Rocky Gerung pada kanal MimbarTube. *Journal Education Innovation E-ISSN*, 2(2).
- Sukardi, M. (2025, January 26). Deddy Corbuzier berpotensi langgar UU perlindungan anak usai hina siswa SD dengan kata Pea. *Inews.id*.
- Uwen, G. O., Ghevolor, A. J., & Bassey, V. O. (2024). Emotive language as construction of situational aggression among drivers at gridlock scenes in Nigeria. *Environment and Social Psychology*, 9(2).
<https://doi.org/10.54517/esp.v9i2.1850>.
- Wibowo, G., Sunuantari, M., Soraya, I., & Gunawan, I. (2024). Analisis foto Instagram publik figur politik Indonesia melalui pendekatan structuralism Pierre Bourdieu. *Jurnal Media Penyiaran*, 4.
- Yusri. (2025). Normalisasi kekerasan verbal berbasis digital di lingkungan sekolah: Studi wacana pada grup media sosial pelajar. *HUMAN: South Asian Journal of Social Studies*, 5(2).